

MEMPERKUAT TATA KELOLA KERJA UNTUK KETENAGAKERJAAN INKLUSIF: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Oleh: Dwi Harsono, Ph.D Utami Dewi, MPP Kurnia Nur Fitriana, MPA Assoc. Prof. Dr. Abdul Jalil Muhammad Ali Assoc. Prof. Dr. Nor Hafizah Mohamed Harith

ABSTRAK

Penyandang disabilitas masih terpinggirkan di pasar kerja karena pengucilan sosial, asumsi negatif atas kemampuan mereka, pendidikan yang tidak tepat, dan implementasi kebijakan yang tidak efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji tata kelola kolaboratif dalam mempromosikan lapangan kerja inklusif di Indonesia dan Malaysia. Juga, tujuan lain adalah untuk menganalisis pencapaian lapangan kerja inklusif di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Melalui metode kuantitatif, survei atau kuesioner disebar ke PWD, sedangkan wawancara mendalam, diskusi kelompok fokus, observasi dan teknik dokumentasi adalah metode kualitatif untuk mengumpulkan data. Sampel dalam penelitian ini adalah orang-orang dengan gangguan fisik dan pendengaran yang merupakan lebih dari 30% di Indonesia dan Malaysia. Informan dalam penelitian ini adalah lembaga pemerintah, sektor swasta, pusat rehabilitasi berbasis masyarakat, LSM dan penyandang cacat.

Singkatnya, ada penelitian

yang menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia telah berupaya mempromosikan pekerjaan yang inklusif. Namun, Malaysia lebih baik daripada Indonesia karena layanan setelah perawatan telah dijaga dengan baik untuk memastikan bahwa para penyandang cacat mematuhi pekerjaan yang layak setelah menyelesaikan rehabilitasi atau pelatihan. Selain itu, kebijakan kepulungan Malaysia untuk mereka yang mengalami cedera atau kecelakaan di tempat kerja telah diterapkan dengan baik. Sementara itu kebijakan kembali bekerja di Indonesia masih belum jelas dalam implementasinya yang dapat mengakibatkan pemecatan PWD dari pekerjaan mereka atau mutasi kerja ke posisi dan gaji yang tidak pantas. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti pentingnya tata kelola kolaboratif di mana semua pemangku kepentingan: pemerintah, sektor swasta, LSM, DPO dan penyandang disabilitas, dapat bekerja sama dalam mempromosikan pekerjaan yang inklusif. Tata kelola kolaboratif ini membutuhkan komitmen tinggi dari semua satkeholders untuk mempersiapkan kesiapan para penyandang cacat dalam bersaing di pasar tenaga kerja dan kemauan sektor publik dan swasta untuk mempekerjakan para penyandang cacat. Baik pemerintah Indonesia dan Malaysia telah mempromosikan lapangan kerja inklusif untuk para penyandang cacat dengan mengimplementasikan beberapa program, namun hasilnya belum optimal. Pemerintah Malaysia berada di depan untuk menyediakan Pelatih Kerja dan program penempatan kerja yang belum diterapkan di Indonesia. Untuk menarik industri swasta dalam menerapkan kebijakan kuota, pemerintah Malaysia telah memberikan insentif (penebusan pajak) untuk mereka sementara di Indonesia apresiasi untuk industri hanya pada pencapaian penghargaan. Pusat rehabilitasi Indonesia di tingkat pusat dan daerah telah memainkan peran dalam pelatihan dan rehabilitasi kejuruan, tetapi tidak dalam menempatkan dan mengamankan pekerjaan bagi para penyandang cacat seperti yang dilakukan di Malaysia oleh Kementerian Kesejahteraan Sosial dan Kementerian Sumber Daya Manusia. Selain itu, dalam beberapa kasus, kegiatan duplikat sering terjadi di antara lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia. Baik pemerintah Indonesia dan Malaysia dan para pemangku kepentingannya harus bekerja keras dalam memerangi asumsi negatif di kalangan pengusaha dan masyarakat terhadap para penyandang cacat. Karena itu, ada peraturan dan tindakan afirmatif untuk mempromosikan pekerjaan yang inklusif, termasuk menegakkan kebijakan kuota. Output dari penelitian ini adalah untuk memberikan buku teks rekomendasi kebijakan dengan menerapkan model tata kelola kolaboratif sebagai pendekatan untuk mempromosikan pekerjaan inklusif pada studi banding antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, temuan penelitian ini disajikan dalam Konferensi Internasional dalam Pendidikan dan Inovasi (ICERI) 2019 di LPPM YSU Indonesia dan Konferensi Internasional Administrasi Publik dan Ilmu Sosial (ICOPS) 2019 di UiTM Malaysia. Publikasi artikel dalam jurnal terindeks scopus seperti Jurnal Ilmu Sosial Kasetart adalah tujuan lain dari organisasi ini.

Kata Kunci: *Penyandang cacat, inklusif, pekerjaan, kebijakan*